

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan secara sistemik tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penulisan tinjauan pustaka sendiri bertujuan untuk: a) menghindari replikasi dan b) pengujian dan pengembangan temuan sebelumnya (Ismail, 2015: 53-54).

Maka dari itu, peneliti meninjau penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. **Penelitian dari Dede Rodin yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an.** Penelitian Dede bertujuan untuk menjelaskan atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang pemberdayaan fakir miskin. upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut Al-Qur'an terkait dengan pemanfaatan dan distribusi harta. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, Al-Quran menempuh beberapa model langkah untuk pemberdayaan fakir miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makanan pokok, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pemberian dari sebagian harta warisan, pembagian ganimah dan fa'i, larangan monopoli (ihtikār) dan menimbun harta (iktināz). Beberapa model pemberdayaan di atas dapat dibagi menjadi dua kelompok; langkah langkah yang bersifat struktural dan yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individu, baik individu yang diharapkan menjadi salah satu subjek pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir

dan miskin maupun yang menjadi objeknya. Pada langkah struktural maupun kultural, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan, bahkan dipandang sebagai sebuah keniscayaan (Rodin, 2015: 71-102).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Dede karena penelitian ini fokus pada konsep pemberdayaan masyarakat secara umum. Sedangkan penelitian Dede secara spesifik mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi fakir miskin.

2. Penelitian dari Cucu Nurjamilah yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi saw. Penelitian Cucu bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian pustaka mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dalam perspektif dakwah Nabi saw. Adapun hasilnya ialah Nabi saw. telah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat Arab berbasis Masjid Nabawi di Madinah. Terdapat dua alasan atau tujuan penting dari pemberdayaan tersebut, yaitu membebaskan manusia dari keyakinan dan budaya menyimpang (*jahiliyyah*), dan mempertahankan dan membangun masyarakat muslim. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu meliputi pemberdayaan dalam aspek spiritual, aspek sosial (persatuan dan kesetaraan), pendidikan, ekonomi, politik, dan pertahanan. Adapun langkah yang ditempuh dalam pemberdayaan adalah menumbuhkan dan membangun potensi spiritual Tauhid masyarakat, menyediakan akses (pranata sosial) yaitu dengan: membangun masjid, membuat kesepakatan dan perjanjian damai dengan berbagai pihak, mendirikan pasar disekitar masjid, membentuk dan melatih pasukan pertahanan, dan kebersamaan (Nurjamilah, 2017: 93-119).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Cucu karena penelitian ini fokus pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam Al-Quran. Sedangkan penelitian

Cucu Nur Jamilah mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Dakwah Nabi saw.

3. **Penelitian dari Novira Kusri dkk yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Jeruji Besar Kecamatan Sungai Kakap.** Penelitian Novira dkk ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi mandiri. Program kemandirian pangan ini merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal pedesaan. Output yang dihasilkan adalah: 1) dari sisi ketersediaan pangan, terciptanya kemandirian diversifikasi produk pangan dan diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga yaitu masyarakat berhasil meningkatkan keterampilannya di dalam pengolahan pangan berbahan baku sumber daya lokal yaitu ikan, 2) terciptanya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk perbaikan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga yaitu masyarakat berhasil meningkatkan keterampilannya di dalam memanfaatkan lahan pekarangan melalui media tanam hidroponik. Outcome yang dihasilkan adalah : 1) Meningkatnya modal 2) perubahan pola pikir masyarakat, 3) peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas pangan; 3) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan sarana dan prasarana pedesaan. Selain itu, adanya kerjasama tim yang kompak antara tim pelaksana IbDM, mahasiswa dan mitra IbDM. Hal ini terlihat dari kelancaran proses kegiatan dimulai dari orientasi, sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada mitra PKK, pengolah ikan dan gula merah. (Novira dkk., 2017: 139-150).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Novira dkk karena penelitian ini tidak melakukan praktik pemberdayaan masyarakat secara langsung, akan tetapi mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan lembaga/instansi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.

4. **Penelitian dari Siti Aminah yang berjudul Fenomena *Social Loafing* dalam Program Pemberdayaan Masyarakat didesa Binaan PMI: Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat.** Penelitian Siti bertujuan untuk mengungkap dimensi personal pengalaman subjektif yang terlibat dalam PPM, menggali efek kelompok PPM secara berkelompok pada individu, dampak kelompok pada task performance, dan sikap *social loafing* pada kelompok PPM tersebut. Hasilnya menggambarkan bahwa tugas PPM antara lain: mengenal masalah-masalah riil di masyarakat, mengidentifikasi dan memecahkannya. Tetapi dalam PPM 1 mahasiswa melakukan penyadaran akan potensi dan solusi masalah yang ada di masyarakat. Seiring bertambahnya anggota kelompok, pengaruh sosial akan semakin menurun sebab tuntutan pihak luar terbagi pada banyak target. *Arousal reduction* atau penurunan semangat. Adanya semangat akan mendorong terjadinya usaha dalam PPM. Anggota PPM yang menganggap input yang mereka berikan tidak terlalu signifikan dalam pencapaian kolektif ternyata mengeluarkan usaha yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang menganggap bahwa peran mereka sangat penting (Aminah, 2017: 141-159).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Siti yang bertujuan mengungkap dimensi personal pengalaman subjektif agen pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan strategi program pemberdayaan masyarakat lembaga/instansi pemberdayaan masyarakat

5. **Penelitian dari Suyanto yang berjudul Membangun Kesadaran Sodaqoh Sampah sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat.** Penelitian Suyanto bertujuan untuk membangun kesadaran Sodaqoh Sampah sebagai model pemberdayaan masyarakat di Dusun Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul, DIY. Hasilnya adalah melakukan pembentukan pengurus PSM Barongan Bersih untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri, bahkan muaranya akan berdampak pada nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan warga. Selain itu perlunya penyediaan bak sampah berbasis warga sesuai jenis sampahnya, misalnya organik, non organik dan jenis sampah yang dikategorikan mengandung zat metanol, seperti baterai dan yang sejenisnya. Sedangkan penyadaran dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain: Modeling terhadap lokasi yang telah sukses melakukan bank sampah dan shodaqoh sampah, Perayaan hari besar dengan cara jalan sehat dengan memungut Sampah, Pelibatan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul yang diundang ketika jalan sehat, Praktek pengelolaan sampah dengan menghadirkan pembicara dari masyarakat yang berhasil misalnya pembuatan pupuk organik, dan lain sebagainya (Suyanto, 2018: 245-256).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Suyanto karena penelitian ini tidak melakukan praktik pemberdayaan masyarakat secara langsung, akan tetapi meneliti strategi pemberdayaan masyarakat menurut lembaga/instansi yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

6. **Penelitian dari Muhsinah Ibrahim yang berjudul Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Sosial.** Penelitian Muhsinah ingin mengkaji dimanakah letak esensial dan relevansinya perbincangan yang menuju pada suatu tindakan, dan mencari pemecahan mengenai kekurangan yang masih kita miliki dalam

upaya memberdayakan komunitas muslim. Adapun hasilnya ialah pemberdayaan potensi masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran Pendidikan Islam. Dengan adanya usaha pemberdayaan potensi masyarakat melalui mekanisme yang sudah disepakati akan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap terwujudnya pendidikan yang memberdayakan masyarakat untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara kreatif dan inovatif (Ibrahim, M., 2017: 40-53).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Muhsinah karena penelitian ini mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat lembaga/instansi pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian Muhsinah mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Islam.

- 7. Penelitian dari Kesi Widjajanti yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat.** Penelitian Kesi bertujuan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui proses modal manusia dan modal fisik. Hasil penelitiannya adalah bahwa pemberdayaan menginginkan pengembangan modal manusia, dan akan lebih baik lagi jika pemberdayaan didukung oleh pengembangan kemampuan pelaku pemberdayaan (Widjajanti, K., 2011: 15-27).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Kesi karena penelitian ini mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat lembaga/instansi pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian Kesi mengkaji upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat.

- 8. Penelitian dari Ravik Karsidi yang berjudul Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat.** Penelitian Ravik bertujuan untuk menguraikan perkembangan penyuluhan pembangunan, penguatan

masyarakat sipil, pembangunan yang memihak rakyat, dan diskusi paradigma tentang peran penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat. Dari penelitian Ravik dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan, organisasi profesi -termasuk Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI)- serta organisasi-organisasi nonpemerintah lainnya. Cara kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat di lapis bawah, seperti kerja penyuluhan memberikan peluang yang luas untuk menggerakkan dan melancarkan proses belajar (Karsidi, R., 2001: 115-125).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ravik karena penelitian ini mendeskripsikan perbandingan konsep dan implementasi program pemberdayaan masyarakat lembaga/instansi pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian Ravik menguraikan tentang peran penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat.

9. **Penelitian dari Ageng Widodo yang berjudul Program Pemberdayaan ‘Sedekah Pohon Pisang’ di Desa Gandri, Lampung Selatan.** Tujuan penelitian Ageng adalah mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan ‘Sedekah Pohon Pisang’ oleh Karang Taruna di Desa Gandri dan melihat berbagai bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan dari hasil program ‘Sedekah Pohon Pisang’. Adapun hasilnya ialah pelaksanaan program pemberdayaan ‘Sedekah Pohon Pisang’ adalah: (1) tahapan pertama, Karang Taruna melakukan survei dan mendata pohon pisang, (2) Karang Taruna mengukur batas petak, (3) karang taruna melakukan penanaman dan perawatan, dan (4) Karang Taruna melakukan kontrol hingga pada tahap pemanenan. Setelah hasil panen terlihat, peran Karang Taruna kemudian memasarkan pohon pisang, hingga menghasilkan pundi-pundi uang. Dari hasil pengumpulan dana yang bersifat sedekah, maka dibentuklah

program pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan ekonomi kreatif. Kegiatan pelatihan ini dilakukan kepada rumah tangga dan ibu-ibu. Selain itu, program yang fokus bagi remaja berprestasi, dinamakan Remaja Sehat Berprestasi (RSP), membentuk komunitas dengan memberikan pelatihan public speaking (cara berpidato) (Widodo, A., 2017: 1-21).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ageng karena penelitian ini tidak mengkaji secara khusus program “sedekah pohon pisang” sebagai program pemberdayaan masyarakat tetapi mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat lembaga/instansi pemberdayaan masyarakat.

10. **Penelitian dari Nensy Lusida dengan judul Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (Mpm) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat).** Tujuan penelitian ini ingin Menjelaskan peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan Pemerintah Desa Warmon Kokoda dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Desa Warmon Kokoda. Adapun hasilnya MPM memiliki peran dan posisi yang penting bagi masyarakat Desa Warmon Kokoda. MPM sebagai kelompok intelektual dan berpihakpada kaum dhuafa mampu menyumbangkan gagasannya untuk kepentingan masyarakat Desa Warmon Kokoda (Lusida, N., 2017: 11).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Nensy Lusida yang mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat menurut lembaga/instansi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian Nensy mengkaji secara khusus teori peran dengan subjek penelitian MPM dan objeknya yaitu Pembentukan dan

Penguatan Pemerintah Desa di Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk,
Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Penulis dan Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian dari Dede Rodin yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an	Kelompok Marginal (Fakir Miskin)	Secara spesifik mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi fakir miskin.
2.	Penelitian dari Cucu Nurjamilah yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi saw	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Dakwah Nabi saw.
3.	Penelitian dari Novira Kusri yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Jeruji Besar Kecamatan Sungai Kakap	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Bersifat penelitian eksperimen yaitu melakukan praktik pemberdayaan masyarakat secara langsung.
4.	Penelitian dari Siti Aminah yang berjudul Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat didesa Binaan PMI: Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Bertujuan mengungkap dimensi personal pengalaman subjektif agen pemberdayaan masyarakat
5.	Penelitian dari Suyanto yang berjudul Membangun Kesadaran Sodaqoh Sampah sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian ini melakukan praktik pemberdayaan masyarakat secara langsung.
6.	Penelitian dari Muhsinah Ibrahim yang berjudul Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Sosial.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Islam.
7.	Penelitian dari Kesi Widjajanti yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Mengkaji upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat.
8.	Penelitian dari Ravik Karsidi yang berjudul Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Menguraikan tentang peran penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat.
9.	Penelitian dari Ageng Widodo yang berjudul Program Pemberdayaan 'Sedekah Pohon Pisang' di Desa Gandri, Lampung Selatan	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	Mengkaji secara khusus program "sedekah pohon pisang" sebagai program

			pemberdayaan masyarakat
10.	Penelitian dari Nensy Lusida dengan judul Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (Mpm) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat).	Konsep Pemberdayaan Masyarakat menurut MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat)	Mengkaji secara khusus teori peran dengan subjek penelitian MPM

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain, sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, dan keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya (Anwas, 2014: 48).

Menurut Djohani (dikutip dalam Anwas, 2014) pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*dispowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Anwas, 2014: 49).

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, Mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Anwas, 2014: 50).

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pandangan UNICEF pendekatannya bertumpu pada resiko keluarga, kebutuhan dan hak-haknya dalam rangka menentukan prioritas dan strategi pembangunan. Ada lima masalah pokok yang silih berganti yakni tingkat kematian ibu yang tinggi, kekurangan gizi ibu dan anak, rendahnya tingkat pendidikan atau kualitas pendidikan yang rendah, penyakit HIV/AIDS dan psikotropika, serta anak-anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.

2.2.2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Anwas (2014: 58-60) dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Unsur unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.

2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sasaran. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
3. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya.
4. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
5. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
6. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
7. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
8. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).
9. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

10. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran potensi dan kemampuannya.
11. Klien atau sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
12. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan atau potensi yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

2.2.3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Usaha memberdayakan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat Mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara (Usman, 1998: 31-32).

Strategi pemberdayaan hakekatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono (dikutip dalam Anwas, 2014: 89-90),

gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model atau laboratorium. Model laboratorium cenderung harus membuat sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebar luaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.

Namun ada beberapa hal yang menjadi pokok dalam pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Mengubah *mindset* masyarakat

Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mereka mampu berdaya, berdiri di atas kakinya sendiri, *autonomy* atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri.

2. Pemberdayaan secara holistik

Kompleksitas masalah dalam masyarakat membuat pembangunan atau pemberdayaan sulit tercapai jika dilakukan secara parsial. Pembangunan menuntut dikembangkan semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat secara simultan dan kontinyu sesuai dengan proses dan permasalahan yang dihadapi.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi mengandung makna atau keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Makna partisipasi dalam penyuluhan pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam: (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) keterlibatan dalam pengawasan, (3) keterlibatan di mana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan, (4) partisipasi sebagai proses penghargaan (*empowerment*), (5) partisipasi bermakna kerja kemitraan (*Partnership*), dan (6) partisipasi sebagai akibat dari pengaruh *stakeholder* menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan, dan penggunaan *resources* yang bermanfaat bagi mereka (Anwas, 2014: 93).

Menurut Asngari (dikutip dalam Anwas, 2014: 95) bahwa pada dasarnya orang mau berperan serta dalam kegiatan atau aktivitas apabila: (1) ia menyadari akan memperoleh manfaat atau kepuasan baik ekonomi maupun nonekonomi, (2) yang mengetahui dengan benar Makna kegiatan tersebut, misalnya: programnya, tujuan, langkah, prosesnya, tahapan lainnya. Setiap aktifitas pemberdayaan perlu didasarkan akan adanya manfaat terhadap diri, keluarga, atau masyarakat lainnya akan perlunya mereka berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Margono Slamet, guru besar IPB Bogor (dikutip dalam Anwas, 2014: 95) bahwa salah satu cara meningkatkan partisipasi dalam masyarakat adalah perlunya ditemukan berbagai lembaga-lembaga non formal yang ada di masyarakat. Lembaga non formal yang ada di masyarakat antara

lain: Majelis Taklim, karang taruna, Posyandu, pos pemberdayaan masyarakat, PAUD, organisasi sosial kemasyarakatan dan pendukung lainnya.

4. Pola Pemberdayaan *Bottom Up*

Pemberdayaan hakikatnya mendorong masyarakat untuk berdaya. Namun sebagai agen pembaharu atau agen pemberdayaan terutama yang bertugas sebagai Aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil) juga memiliki tugas dalam menyukseskan program pemerintah. Program pemerintah ini biasanya *top down*, yaitu sistem pembangunan masih dikelola secara penuh oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Begitu pula pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha atau BUMN, mereka biasanya memiliki agenda tersendiri dalam membangun citra dan image lembaga. Dalam hal ini agen pemberdayaan dituntut untuk melakukan sebuah *join planning* antara kebutuhan atau potensi sasaran dengan agenda atau program lembaga tersebut melalui kegiatan pemberdayaan yang saling menguntungkan.